

Jaringan Sosial Tradisional Informal dan Konflik antar Kelompok Sosial di NTT

Yanuaris Koli B.

Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah propinsi kepulauan yang sangat heterogen dari segi etnis dan geografis. Dari segi geografis propinsi ini memiliki 566 buah pulau besar dan kecil dihuni oleh sekitar 75 kelompok etnis dengan budayanya sendiri-sendiri yang mendiami 42 buah pulau. Di wilayah ini terdapat sejumlah persoalan yang rumit antara lain: mudah terjadinya konflik antara suku (etnis/klan), tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan serta sebagian warganya apatis dan sebagian lainnya terlampaui kritis terhadap program pemerintahan dan hal-hal baru (inivasi) yang datang dari luar (P3PK-UGM, evaluasi PPWBD, 1988; Hill, 1989; Mubyarto, dkk, 1991). Dalam pada itu, warga masyarakat NTT juga mengalami berbagai permasalahan dibidang hukum, terutama menyangkut transaksi jual-beli tanah dan kepastian kepemilikan tanah, di samping masalah lain seperti: fanatisme suku, sengketa batas tanah suku, wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten, juga masalah lingkungan hidup seperti perladangan berpindah, penyerobotan hutan tutupan, kebiasaan membakar hutan, serta adanya kantong wilayah desa 'enclave' (Soetrisno 1988; Hill 1989; Fernandez 1990).

Kondisi yang dihadapi warga masyarakat NTT di atas bersama-sama dengan kelangkaan sumber daya alam dan

sumber daya manusia telah mengakibatkan terjadinya migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Setelah tiba di kota konflik yang pernah terjadi di daerah pedesaan tetap tampak, bahkan cenderung lebih kuat disebabkan oleh persaingan untuk memperoleh barang guna memenuhi kebutuhan hidup di kota yang persediaannya terbatas (*scarce*).

Dari pengamatan lapangan selama ini diketahui bahwa pelaku kegiatan perekonomian di NTT berasal dari berbagai etnis dan kelompok agama, dan sebagian besar dari mereka adalah migran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagaimana di antara mereka sudah lama bermigrasi dan sebagiannya lagi baru bermigrasi selama dan sesudah terjadi perang saudara di Timor Timur (Timor Loro sae), terlebih setelah Timor-Timur dinyatakan daerah terbuka.

Sementara itu hubungan sosial dan kultural antara mereka yang sudah bermigrasi ke NTT, terutama ke kota Kupang dengan daerah asalnya tidak terputus sehingga ikatan tradisionalnya tidak pudar, dan hal ini menjadi potensi konflik antar kelompok sosial sebab setiap kelompok etnis menjaga identitas kelompoknya sendiri-sendiri. Interaksi sosial yang bersifat konflik tampak jelas dari tutur kata warga masyarakat dalam pergaulan sehari-hari melalui pertanyaan atau ungkapan seperti: "dia orang mana, atau dia orang apa". Pertanyaan pertama biasanya menghendaki jawaban menyangkut asal daerah atau etnis seseorang, seperti: "orang timor, orang flores, orang Rote, Oranga sabu, Orang Alor, Orang Sumba, Oranga Bugis/ Maksiar, Orang Jawa, Oranag Sumatera, dan sejenisnya. Sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan agama yang dianut seseorang seperti orang Bhuda, Orang Hindu, Orang Islam, Orang Khatolik, atau Orang Protestan. Pengamatan di lapangan selama ini memperlihatkan bahwa kelompok etnis yang berasal dari NTT yakni Rote, Timor, dan Flores merupakan kelompok yang dominan dalam organisasi pemerintahan, tetapi dalam kegiatan perekonomian sektor informal mereka tidak dominan, melainkan kelompok etnis yang berasal dari luar NTT, yaitu Bugis dan Jawa yang lebih dominan. Masing-masing kelompok etnis mempunyai jenis kegiatan tertentu pada sektor informal dan sektor tersebut sulit dimasuki oleh kelompok etnis lain.

Perumusan masalah

Berkenaan dengan kemajemukan kelompok-kelompok etnis yang melakukan kegiatan sektor informal serta sering terjadinya konflik antar kelompok sosial di NTT maka tulisan ini difokuskan pada upaya menjawab pertanyaan bagaimana jaringan sosial tradisional pada sektor informal dibangun dan dipertahankan oleh kelompok-kelompok sosial dan mengapa sering terjadi konflik antara kelompok sosial di NTT?

Pembahasan

Jaringan sosial tradisional

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, beberapa kelompok etnis wilayah NTT sudah melakukan kegiatan perdagangan

dengan baik. Bahkan dai catatan sejarah diketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda pernah mengeluarkan larangan berlayar bagi perahu milik para pedagang lokal di perairan Timor (Fo, 1996). Dari catatan sejarah diketahui pula bahwa kebijakan pemerintah (penjajah) Belanda yang bersifat diskriminatif dalam bidang ekonomi dan pemerintahan terhadap masyarakat NTT yang majemuk dengan cara membiarkan kelompok etnis Sabu, Rote, dan Solor melakukan kegiatan perekonomian informal, membebaskan sebagian mereka dari pajak, memperbolehkan mereka menduduki jabatan pemerintahan dan militer sebagai imbalan atas jasa mereka dalam melindungi pemerintahan Belanda terhadap serangan Raja-raja lokal di Timor merupakan awal dibangunnya jaringan sosial tradisional dan kelompok agama.

Meskipun pemerintah kolonial tidak secara langsung membagi kegiatan di antara kelompok etnis yang ada, tetapi keiasaan di daerah asal masing-masing kelompok/subkelompok etnis menyebabkan mereka terkonsentrasi ke dalam jenis kegiatan tertentu. Kecenderungan itu semakin kuat dengan adanya perlakuan beda oleh pemerintah Belanda kepada kelompok-kelompok etnis yang ada sehingga lambat laun terbentuk jaringan kegiatan ekonomi yang kokoh, seperti: penjagal hewan dan penjual daging berasal dari Rote, penjual Siri/pinang dari Rote dan sbu, penjual rempah-rempah dan buah-buahan dari kepulan kecil di bagian Timor flores (Solor). Bahkan beberapa pelaku sejarah mengakui bahwa pemerintah kolonial memberikan kesempatan secara diskriminatif kepada kelompok etnis Rote dan Sabu untuk menduduki jabatan sipil dan militer samapai Kapten.

Segera setelah kekalahan Jepang dari sekutu, banyak di antar prajurit Belanda yang pribumi NTT kembali ke daerahnya dengan membawa serta isteri dan keluarganya yang berasal dari luar NTT, terutama dari etnis Jawa dan sunda. Kehadiran mereka di NTT tidak berarti putusya hubungan sosial dan kultural dengan daerah asal, bahkan sebaliknya mereka mengajak serta sanak keluarganya sambil memperkenalkan beberapa jenis kegiatan sektor informal yang baru untuk masyarakat NTT, antara lain memproduksi dan memasarkan jenis-jenis makanan dan jamu.

Pada waktu terjadi perang saudara Timor Timur dan setelahnya, terjadi gelombang migrasi swakarsa besar-besaran dari Sulawesi Selatan, Jawa, dan Madura ke wilayah NTT, khususnya ke Kupang. Mereka menekuni bidang-bidang kegiatan sektor informal; yang sudah ditekuni di tempat asal mereka dan yang sudah dilakukan oelh sesama sedaerah dan seetnis di NTT sehingga terjalin jaringan kegiatan sektorinformal yang relatif kokoh dan tertutup.

Sementara itu , seperti diutarakan di atas hubungan sosial dan kultural anatar mereka yang berurbanisasi dan bermigrasi dengan daerah asalnya tidak terputus, bahkan hubungan tersebut tercondong lebih intensif dengan tersedianya sarana tranportasi dan komunikasi. Kesenambungan hubungan sosial kultural ini tampak dari intensitas berpergian ke daerah asal dan upaya-upaya untuk mempertahankan nilai

dan tradisi daerah asalnya di daerah tujuan (Kupanga). Beberapa di antaranya adalah yang menyangkut ritus-ritus kehidupan dari sejak kehamilan, lahir, dwasa/kawani, kematian, serta ritus setelah kematian seseorang. Sistem perkawinan ke dalam kelompok etnis yang tertutup dan penggunaan bahasa daerah asal dalam pergaulan dengan sesama sedaerah serta pemberian nama menurut tradisi derah asal (totem name) misalnya, adalah dua bentk upaya mempertahankan tradisi daerah asal dan jaringan tradisional yang lain.

Konflik antar kelompok sosial

Dari catatan sejarah diketahui bahwa migran lokal asal NTT, sudah mengalami konflik berkepanjangan di daerah asalnya sebelum merka bermigrasi ke Kupang. Kelompok etnis Rote misalnya, sudah terbagi ke dalam 18 buah sub kelompok etnis dengan sub kebudayaan masing-masing dan pemerintah kolonial Belanda sendiri mengambil keuntungan dari konflik antar sub kelompok etnis ini. Pemindahan mereka ke Kupang anantara lain dimaksudkan untuk memperhadapkan mereka dengan kelompok etnis lain yang ada di Timor untuk melindungi kepentingan kolonial, sementara anta mereka sendiri diciptakan hubungan yang sifatny konflik agar tidak mampu membangun kekuatan melawan pemerintahan kolonial.

Secara teoritis konflik yang menyangkut pasar komoditi barang dan jasa diantara pelaku kegiatan sektor informal sulit dibayangkan karena ada pengelompokan etnis menurut jenis kegiatan sehingga wilayah persaingan masing-masing kelompok etnis dalam menawarkan komoditinya hampir tidak ada. Namun dilihat dari tata ruang, persaingan itu sangat jelas dan oleh karena itu interaksi sosial yang bersifat konflik selalu terjadi diantar mereka. Konflik karena perebutan ruang ini sering dihubungkan dengan asal daerah, suku, dan agama sehingga pada akhirnya konflik pada bidang ekonomi iniberkembang menjadi konflik antar kelompok sosial dalam arti luas. Konflik juga tidak dapat dihindari karena adanya 'ketmpangan' perolehan pendapatan antara mereka yang berasal dari pulau rote, Sabu, Flores, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang menekuni kegiatan perekonomian informal, sebab jenis kegiatan yang dipilih oleh para imigran dari luar NTT lebih unggul, pasarnya lebih luas dan keuntungan yang diperoleh lebih besar. Kenyataan ini diakui oleh sebagian pelaku ekonomi sektor informal sebagai penyebab yang menimbulkan kecemburuan sosial yang melahirkan konflik. Konflik tersebut berkembang menjadi konflik antar kelompok etnis dan kelompok agama karena ada konsistensi atau konsolidasi parameter ekonomi, etnis dan agama (dan juga politik).

Sejauh yang diketahui dari 39 buah peraturan yang ada, pengaturan sektor informal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aparatus negara lebih bersifat membatasi bahkan merugikan, terutama mereka yang berasal dari NTT meskipun secara tidak langsung (*by implication*) ada kebijakan yang

lebih berpihak pada kepentingan mereka. Ketentuan mengenai besarnya nilai kontrak tempat berdagang dan persyaratan mengajukan ijin mendirikan kios adalah dua dari sejumlah ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar mereka yang berasal dari NTT yang akhirnya mengakibatkan mereka tidak dapat bersaing disamping karena berbagai sebab lain seperti: pilihan bidang kerja, besarnya modal, ketrampilan dan pengalaman berusaha, serta semangat berusaha yang lebih rendah jika dibandingkan dengan migran yang berasal dari luar NTT. Meskipun kebijakan aparatus negara tidak selalu bias pada kepentingan kelompok etnis dan kelompok agama yang dominan dalam organisasi pemerintahan akan tetapi negara sebagai 'actor omniscipotent' sering menghadapi kesulitan karena para pejabatnya juga sangat majemuk dari segi etnis dan agama. Akibatnya, kebijakan pejabat negara cenderung tidak dipercaya, bahkan dicurigai oleh warga masyarakat dari kelompok etnis atau kelompok agama yang berbeda, dan hal ini dapat memicu konflik antar kelompok sosial.

Kebijakan 'pintu terbuka' yang ditempuh untuk mendatangkan pelaku kegiatan perekonomian sektor informal dari Sulawesi selatan misalnya, ditanggapi dengan sikap curiga oleh sebagian pejabat pemerintah dan pelaku kegiatan sektor informal yang berasal dari NTT karena dianggap mengurangi peluang usaha dan 'mencaplok' lahan orang NTT untuk mencari nafkah. Sikap curiga dan tidak puas tersebut diwujudkan antar lain dengan menyebarkan 'rumor' bersifat primordial, meskipun kebijakan tersebut dimaksud sebagai suatu 'proses pembelajaran ekonomi' agar masyarakat NTT belajar melakukan kegiatan perekonomian dari mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan yang sudah lebih berpengalaman dan ulet.

Walaupun ada kelompok etnis yang mayoritas dalam organisasi negara karena secara kuantitatif jumlah mereka dominan dan secara kualitatif menguasai locu kekuasaan, akan tetapi kelompok tersebut tidak merupakan kelompok dominan dalam kegiatan sektor informal karena aparatus negara tidak memberi proteksi kepada pelaku ekonomi yang tidak menguntungkan negara dari sisi investasi atau akumulasi kapital dan pendapatan negara. Hal ini mengakibatkan pelaku ekonomi sektor informal yang berasal dari kelompok etnis yang dominan dalam organisasi negara dibiarkan bersaing dengan pelaku ekonomi sektor informal dari kelompok etnis yang minoritas dalam organisasi negara. Akibatnya, pelaku ekonomi yang berasal dari etnis mayoritas dalam pemerintahan menjadi minoritas dalam sektor informal sebab jenis kegiatan, modal, jangkauan pasar bagi komoditi barang dan jasa yang ditawarkan, keterampilan serta pengalaman mereka relatif terbatas jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi minoritas dalam pemerintahan.

Tidak adanya proteksi tersebut disebabkan juga oleh kecenderungan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan warganya sendiri sebab mereka merasa diri sebagai pejabat

pemerintah pusat yang melaksanakan tugas di daerah. Anggapan seperti itu dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pusat dan pegawai daerah yang menduduki jabatan struktural di daerah. Mengingat pemerintah pusat lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan memerlukan investasi dalam jumlah yang besar dengan prasyarat adanya kestabilan, kebanyakan keputusan yang diambil pemerintah daerah lebih merupakan usaha menjaga kepentingan pusat dan bukan demi kepentingan warga masyarakat di daerah. Dalam hal ini sektor informal yang dipandang tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak mampu menarik investasi besar, serta menjadi sumber ketidakstabilan lebih cenderung ditempatkan sebagai 'katup pengaman' sambil 'dimanfaatkan' sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kenijakan pemerintah daerah yang dimaksud untuk menjaga kepentingan pusat kemudian ditafsirkan oleh pelaku kegiatan sektor informal yang berbeda kelompok etnis dengan pejabat negara yang mengambil keputusan sebagai tindakan diskriminatif sehingga memicu konflik kelompok etnis dan konflik kelompok agama.

Setelah terjadi fusi partai pada tahun 1971, sebagian besar elite partai politik bergabung ke dalam Golongan Karya dan tidak masuk ke dalam partai politik. Hal ini mengakibatkan persaingan yang sangat ketat di antara elite yang baru bergabung. Untuk memenangkan persaingan itu mereka membangun basis masa melalui ikatan lama yang bersifat primordial, yaitu ikatan kesukuan, dan agama. Dengan demikian elite tradisional dalam masyarakat kesukuan dan elite agama mengalami pengelompokan baru dan dengan sendirinya menciptakan jarak sosial diantara mereka serta membuka peluang terjadinya konflik antar kelompok agama dan etnis. Konflik yang terjadi setelah fusi partai tampaknya lebih disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara elite lokal sebab kekuasaan merupakan sumber penghidupan atau sumber daya ekonomi bagi mereka yang berada dalam struktur pemerintahan, dan konflik tersebut diwarnai oleh sentimen etnis dan agama.

Berkurangnya jumlah pejabat pemerintah yang berasal dari suku Rote dan Sabu yang dominan pada awal berdirinya NTT sampai dengan tahun 1990-an merupakan salah satu sumber ketegangan dan konflik diantara kelompok etnis dan kelompok agama yang ada di NTT. Sebagian anggota kelompok etnis Sabu dan Rote cenderung mengelompokkan dirinya ke dalam kelompok etnis Timor sehingga ketegangan dan konflik sengatan mereka yang berasal dari daratan Flores mudah berkembang menjadi konflik antara Timor dan Flores, antara penganut agama protestan dan agama khatolik.

Kebijakan politik dalam hal pengisian lowongan atau pengangkatan pejabat politik seperti bupati dan Sekwilda secara berpasangan beda etnis dan beda agama yang pernah ditempuh tampaknya tidak mampu menghilangkan konflik di antara kelompok etnis dan kelompok penganut agama yang ada, sebab pada umumnya masyarakat enggan menerima pejabat yang berbeda etnis dan berbeda agama dengan agama

yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah yang dipimpin oleh pejabat tersebut. Kecenderungan seperti itu menyebabkan semakin suburnya sentimen primordial dan konflik antar etnis dan antar kelompok penganut agama yang berbeda di daerah NTT.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai intitusi sosial, negara dan aparaturnya tidak mampu mengatasi konflik sosial yang ditimbulkan oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan perebutan sumber daya ekonomi, terlebih apabila konflik tersebut terjadi di anatar kelompok etnis dan penganut agama yang berbeda karena dalam intitusi negara sendiri terdapat para pejabat yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda dan mempunyai kepentingan ekonomi yang berbeda. Secara lebih khusus, negara sebagai institusi politik serta kelompok etnis dan kelompok agama sebagai institusi sosial sesungguhnya berada dalam hubungan konflik, karena negara cenderung melakukan penyeragaman, menolak keanekaan dan perbedaan, sedangkan kelompok etnis dan kelompok agama cenderung mempertahankan dan memperjuangkan keanekaan dengan mempertahankan ciri, simbol, dan kepentingan anggotanya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa negara sebagai institusi politik yang mengatur politik sebagai subsistem dari sistem sosial yang lebih luas tidak sepenuhnya memperjuangkan kemerdekaan warganya, tetapi cenderung menekan atau bahkan menghilangkan kemerdekaan warganya; sebaliknya, dalam kelompok etnis dan agama individu dan masyarakat memperoleh kemerdekaan yang lebih besar melalui ekspresi etnisitasnya. Kenyataan ini dapat melahirkan konflik vertikal antar kelompok sosial dengan negara.

Dari berbagai catatan lapangan yang ada antara tahun 1987-1996 terdapat setidaknya-tidaknnya 42 kali konflik terbuka yang melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam jumlah besar dan menelan korban materi dan bahkan korban jiwa. Konflik-konflik tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perebutan sumber daya ekonomi atau perebutan ruang untuk kegiatan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok sosial dan cenderung terulang kembali dikarenakan oleh konsolidasi parameter ekonomi, etnis, agama, dan politik seperti diutarakan di atas.

Penutup

Kesimpulan

Jaringan sosial tradisional yang tercipta dalam kegiatan sektor informal di NTT merupakan jaringan yang relatif kokoh dan tertutup, mempunyai sejarah masa lalu yang panjang dan memiliki konsistensi yang cukup tinggi (konsolidasi) dengan parameter ekonomi, etnis, agama, dan politik. Kegiatan ini tidak saja merupakan upaya warga masyarakat untuk memenuhi kepentingan ekonominya, tetapi juga merupakan salah satu bentuk ekspresi diri seperti dikatakan Mar sekaligus merupakan ekspresi etnisitasnya maka kompetisi dan konflik dalam kegiatan ini mudah berkembang menjadi kompetisi dan konflik antar kelompok

sosial.

Dalam situasi kesempatan kerja yang terbatas dan mengalami segmentasi (split-labour market) menurut kelompok etnis (juga agama) seperti di NTT, tekanan atau perlakuan yang merugikan secara ekonomis tetapi juga diartikan sebagai 'serangan' terhadap kelompok etnis yang melakukan kegiatan itu sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik dengan negara dan dengan kelompok sosial yang lebih akses pada kekuasaan negara. Keterbatasan kesempatan kerja dan ketegangan dan konflik ini akan semakin memperkokoh jaringan sosial tradisional dan menambah sentimen primordial, dan suasana konflik seperti ini akan mengakibatkan kegiatan perekonomian terganggu jika tidak ditata (manage) dengan baik.

Konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok etnis di NTT lebih didasari oleh kepentingan ekonomi dan bukan oleh perbedaan itu sendiri, walau setiap perbedaan dalam dirinya mengandung potensi konflik. Konflik baru akan terjadi, apabila ada kelompok yang tidak menghendaki adanya perbedaan atau bahkan ingin menenyapkan perbedaan. Dalam hal ini sumber konflik tidak saja berada dalam perbedaan setiap kelompok sosial tetapi juga dalam setiap kebijakan negara yang dimaksud untuk menciptakan keseragaman dan menghilangkan perbedaan dalam masyarakat.

Beberapa saran

Jaringan sosial tradisional bukanlah satu gejala tunggal dari sisi diversifikasi kultur atau politik saja tetapi merupakan gejala yang konteks, menyisakan sejarah masa lampau dan mencakup beberapa parameter, yakni: ekonomi, politik, etnis, dan agama, meskipun ekspresinya yang paling jelas tampak dalam kegiatan politik dan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka diperlukan 'pemutusan' masa lampau antara lain dengan melakukan pembauran pemukiman dan untuk itu berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk perlu dikaji kembali agar dapat memilih alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan ditimbulkan oleh kemajemukan dan jaringan sosial tradisional yang ada dan tidak melahirkan konflik baru.

Agar tidak terjadi ketegangan dan konflik sosial kerana kesempatan kerja terbatas dan terjadi segmentasi pasar kerja menurut jaringan sosial tradisional, maka pemerintah perlu bersikap netral dan transparan, memberikan peluang kepada semua kelompok sosial yang ada untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan (politik) dan perekonomian tanpa menghilangkan perbedaan atau kekhasan setiap kelompok sosial serta tidak menutu kemungkinan untuk memberikan proteksi atau perlindungan sehingga ada kontrol terhadap kebijakan pemerintah dari masyarakat, kepentingan masyarakat lokal dapat disrtikulasikan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan komunikasi antar kelompok etnis dapat dilakukan secara lebih intensif sehingga persatuan dan

kesatuan (pluriformitas dan uniformita) dapat dijaga.

Kompetisi yang cenderung berkembang menjadi konflik antar kelompok etnis yang berbeda sering terjadi kerana perebutan sumber daya, saling curiga karena isolasi sosial budaya dan geografis, serta masih sulitnya 'penerimaan sosial' (*social acceptance*) penduduk lokal terhadap migran, konsolidasi parameter ekonomi, politik, agama, dan etnis, maka dalam menempuh kebijakan tranmigrasi atau dalam menanggapi kehadiran migran pemerintah hendaknya mengeliminir konsolidasi berbagai parameter tersebut antara lain dengan cara melakukan pembauran dan memberikan proteksi dalam hal tertentu kepada kelompok etnis yang memerlukannya agar tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan.

Kepustakaan

Adrian, Dewi

- 1986 *Ekonomi Sektor Informal: Studi Kasus Pemupukan Modal Pedagang Pengecer Rokok di Kotamadya Palembang*. (Skripsi FE Universitas Sriwijaya).

Amal, Ichlsul dan Armaidly Armawi(eds.)

- 1998 *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press.

Anwar, Moh. Arsyad, Faisal H. Basri dan M. Ichsan

- 1995 *Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan: Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Panjang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bakir, Zainab, and Chris Manning(eds.)

- 1984 *Angkatan Kerja di Indonesia: Partisipasi, Kesempatan dan Pengangguran*. Jakarta: C.V. Rajawali.

Bandiyono, S.

- 1994 *Angkatan kerja, migrasi, dan Sektor Informal di Kota Kupang*, Jakarta : Leknas-LIPI.

Bechtold, Karl Heinz, W.

- 1998 *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, (Penerjemah Lily Suherly). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Beetham, David

- 1987 *Bureucracy*. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Boot, Elizabeth

- 1971 *Family and social Network: Roles, Norms, and eternal Relationship in Ordinary Urban Families*, (2nd edition), Tavistock, London.

Breman, Jan

- 1975 *Labour Relations in The Formal and Informal sectors: Report of a Case Study in South Gujarat, India*, Rotterdam Departement of Comparative Sociology, Erasmus University, Rotterdam.

Breman, Jan, C.

- 1976 'A Dualistic labour System: A Critique Of the Informal Sector's Concept', *Economy and political Weekly*, No. 48 Nov. 27.

Bromley, Ray

- 1978a 'Organization, Regulation, and Explotation in The so-called 'Urban Informal Sector: The Street Traders of Cali, Colombia'', *WDR*, 6(9/10), Pp. 1161-1171.

- 1978b 'Introduction to The Informal Sector: Why It Is Wort Dicussing', *WDR*, 6(9/10): 1033-1039.

Bujlmer, Joep

- 1988 *Employment an Acomodation in The Ambulatory Street Economy: The Case of Surabaya, Indonesia*. Amsterdam: Free Press.

Burkitt, Brian

- 1984 *The Radical Political Economy*, Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books, Ltd.

Connel, John

- 1990 *Migration From Rural Areas*, Bombay: Oxford University Press.

Coser, Lewis, A.

- 1974 *The Functions of Social Conflict*. London: Englewood-Cliffs, Inc.

Craib, Ian

- 1986 *Teori-Teori Sosial Modern*. Jakarta: CV Rajawali.

Davis, Kingsley and Mikhail S. Berstam

- 1991 *Resources, Environement and Population: Present Knowledge, Future options, and Development Review*. The Populations Council, New-York: Oxford University Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- 1992 *Adat-istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*. Jakarta.

Doko, I. H.

- 1981 *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Balai Pustaka.

Efendi, Tadjudin Noer

- 1991 *The Growth of Rural Non-Farm Activities at The Local Level: A Case Study Of Causes and Effect in a Subdistrict of U Plan Central Java*, disertasi Ph.d, Flinders University.

- 1992 *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Evers, Hans-Dieter

- 1973 *Group Conflict and Class Formation in South-East Asia, (In Modernization in South-East Asia)*. Singapore: Oxford University Press.

- Ferman, Louise. A, Stuart Henry, Michele. Hoyman
 1987 'Issue and Prospect for the Study of Informal Economies: Concepts, Research Strategies, and Policy', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Gaughan, Joseph. P and Laouis A. Ferman
 1987 'Toward an Understanding of The Informal Economy', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Gerry, Chris
 1987 'Developing Economies and The Informal Sectors in Historical Perspective', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Gershuny, Jonathan
 1987 'Technology, Social Innovation, and The Informal Economy', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Glazer, N and Daniel P. Moynihan
 1976 *Ethnicity: Theory and Eperience*. London: Harvard University Press.
- Gilbert, Alan and Josef Gugler
 1990 *Cities, Poverty, and development: Urbanization in Third World*. Oxford-New-York, Oxford University Press.
- Gmelch, G. and Walter P. Zenner
 1980 *Urban Life: Reading in Urban Anthropology*. NY, St. Martin's Press.
- Goldscheider (eds.)
 1989 *Labour Allocation an Rural Development Migration in Four Javanesse Villages*. London, Westview Press, Inc.
- Haggard, Stephen
 1990 *Pathways from Periphery*. Ithaca-London, Cornell University Press.
- Hayami, Yujiro ang M, Kikhuci
 1987 *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Henry, Stuart
 1987 'The Political Economy of Informal Economies', *The Annals*. London, Sage Publication, Inc.
- Herlianto
 1997 *Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusuhan Kota*, Bandung: Penerbit Alumi.
- Hidayat
 1978 'Peranan Sektor Informan Dalam Perekonomian Indonesia', *EKI*, Desember, 26 (4)
 1987 'Peranan, Profil dan Prospek Pedagang Eceran (Formal dan Informal) dalam Pembangunan, *Prisma*, Juli.
- Hidayat, Z. M.
 1978 *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*. Bandung, Tarsito.
- Hill, Hal
 1989 *Unity and Diversity*. NY: Oxford University Press.
- Hirsh, Werner, Z.
 1973 *Urban Economic Analysis*. NY: McGraw-Hill Book Company.
- Hoyman, Michele
 1987 'Female Participation In The Informal Economy: A Neglected Issue', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- International Labour Office (ILO)
 1993 *Developmant Of The Rural Informal Sector: Policies and Strategies, (A Discussion Papre on Asian Sub-regional Seminar on Employment Policies For Rural Informal Sector in East and Southeast Asia)*, Yogyakarta, May, 24-28.
 NTT Dalam Pers, 1989, 1992, 1993, Biro Humas Setwilda Tk. I. NTT
 Kompas, 26 September, 1986
 NTT Dalam Angka, 1991-1996
 Kotif Kupang Dalam Angka, 1993
- Isaac, Harold, A.
 1975 'Idiols of The Tribe: Group Identity and Political Change', (Diterjemahkan oleh Canysius Maran, 1993), *Sociological Bulletine*, Vol. 25. No. 1, March. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jelineck, Lea
 1976 'The Life Of Jakarta Street Traders: Two years Later', *Melbourne, Center of South- East Asian Studies-Monash University, Working paper*, No. 13
- Jhonsons, Doyle, Paul
 1981 *Sociological Theory: Founders and Contemporary Perspective*. London: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Lee, E. S.
 1992 *Teori Migrasi*. Yogyakarta: PPK UGM.
- Manehat, Piet, SVD dan G. Neonbasu, SVD
 1990 *Agenda Budaya Pulau Timor (Vol. 1)*, Timor: Komisi Komunikasi Sosial Propinsi SVD Timor.
- Manning, Chris and Tadjudin Nur Effendi (eds.)
 1991 *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Manning, Chris, dkk.
 1991 *Struktur Pekerjaan, Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota: Studi Kasus di Dirjaprajan*, Yogyakarta. Yogyakarta: PPK UGM, Hal: 939-99.

- Miller, S. M.
1987 'The Pursuit of Informal Economy', *The Annals*. Sage Publication, Inc, London.
- Moeliono, J. dan Russ Dilt
1988 *Informal Sector: Appropriate Technology, The Informal Sector and Non-Formal Education in Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Mubyarto
1988 Perkembangan Sektor Informal: Masalah atau Solusi, (Makalah seminar), P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mueller, Dennis C.
1983 *The Political Economy of Growth*. London: Yale University Press.
- Nasikun, J.
1980 'Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di Negeri-Negeri Berkembang', *Prisma*, Juni, 6 (8).
- Nasution, Zein
1987 *Usaha Sektor Informal di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Nihan, Geroges and Robert Jordan
1987 'The Modern Informal Sector in Nouakchott', *ILO Review*, 117 (6):707-719.
- Norholt, H.G. Schulte
1971 'The Political System of The Atony of Timor', *The Hague*, Martinus Nijhoff.
- Nugroho, H.
1987 'Analisis Keterkaitan antara Sektor Informal-Formal: Menuju Paradigma sebagai Landasan Pengembangan Sektor Informal', *IPADI*, Oktober, 8 (2): 1-5.
- Ormeling, Ferdinan, Jan
1955 *The Timor Problem: A Geographical Interpretation of An Underdeveloped Island*. Groningen: J.B. Walters-Jakarta.
- Parera, A.D. M.
1994 *Sejarah Pemerintah Raja-raja Timor*, (editor G. Neonbasu), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Paul, Raymond, E.
1987 'Does Jobless Mean Workless? Unemployment and Informal Work', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Portes, Alejandro, dkk.
1989 *The Informal Economy*. London: The John Hopkins University Press.
- Rachbini, Didik. J dan Abdul Hamid
1994 *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Ramli, Rusli
1990 *Penciptaan Kesempatan Kerja Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta, (Disertasi S-3)*, Bandung: Unpad.
- Roberts, Bryan
1978 *Cities of Peasants : Explorations in Urban Analysis*. NY: Edward Arnold.
- Sampson, St. L.
1987 'The Second Economy of The Soviet Union and Eastern Europe', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Schwarz, Adam
1995 *A Nation In Waiting: Indonesia in The 1990's*, San Fransisco: Westview Press.
- Sethuraman, S.V.
1987 'The Informal Sector and The Urban Poor in The Third World', In Koop, Andreas, (eds.), *Scientific Position to Meet The Challenge of Rural and Urban Poverty in Developing Countries*, Hamburg, Verlag Weltarchiv, GMBH.
- Smith, Carrol, A.
1976a *Regional Analysis, Vol.1: Economic System*. London: Academic Press.
1976b *Regional Analysis, Vol.2: Social System*, London: Academic Press.
- Smith, H.W.
1975 *Strategies of Social Research: The Methodological Imagination*. NY: Prentice_Hall, Inc, Englewood Cliffs.
- Smith, James, D.
1987 'Measuring The Informal Economy', *The Annals*. London: Sage Publication, Inc.
- Soto, Hernando, de
1987 *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Souza, Paulo, M, and Victor E. Tokman
1976 'The Informal Urban Sector in Latin America', *ILO Review*, 114(3):355-356.
- Suparlan, P. (eds.)
1995 *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tambunan, Tulus
1995 *Patterns of Change, Development and Rural Linkages of Small Scale Industries in A Developing Economy*. Jakarta: UKI Press.
- Tokman, Victor, E.
1978a 'Competition Between The Informal and formal Sectors in Retailing: The Case of Santiago', *WD*, Vol 6, No. 9/10: 1187-1198.

1978b 'An Exploration into The Nature of Informal - formal Sectors Relationships', *WD*, Vol 6, No. 9/10: 1065-1075.

Universitas Kristen Artha Wacana

1990 Profil Sektor Informal di Koordinator Pemerintahan Kota Administratif Kupang, dan Koordinator Pemerintahan Kota Soe, Kupang.

Weeks, John

1975 'Policies For Expanding Employment in The Informal Urban Sector of Developing Economics'. *ILO Review*, Vol. 111: 1-13

Wolf, Diana, L.

1986 *Factory Daughters, Their families and Rural Industrialization in Central Java*. Michigan, US: Cornell University Press.